

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2014-2016 adalah sebagai berikut:
  - a) Terdapat aset tetap pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan dan RSUD Pemerintah Kabupaten yang belum diinventarisasi secara menyeluruh. Dan terdapat aset tetap berupa badan jalan dan bahu jalan yang belum tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Kupang
  - b) Masih banyak barang-barang yang belum tercatat dalam KIB dan KIR serta labelisasi/pengkodean belum dibuat.
  - c) Terdapat aset tetap tanah milik Pemerintah Daerah yang belum bersertifikat, masih berupa dokumen penyerahan hak dari masyarakat minimal sebanyak 105 bidang seluas minimal 2.569.284 m<sup>2</sup> dan yang sudah memiliki gambar situasi dan gambar ukur dari BPN sebanyak 38 bidang seluas 551.499 m<sup>2</sup>.
  - d) Terdapat aset tetap berupa 6 bidang tanah, 48 unit peralatan dan mesin, 27 bangunan irigasi dan jaringan yang belum disajikan dengan nilai wajar masih dengan nilai Rp0, Rp1, Rp2, Rp9 dan minus.
  - e) Peralatan dan mesin berupa sepeda motor yang dibawa pensiunan dan pegawai mutasi sebanyak 30 unit dan mobil sebanyak 26 unit.

- f) Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang belum menyajikan aset yang dihasilkan dari pengeluaran dan BOS, belum melakukan inventarisasi, dan belum membuat Berita Acara Serah Terima Aset.
2. Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dalam menindaklanjuti hasil temuan tersebut, diantaranya:
- a) Mengadakan sosialisasi untuk melakukan inventarisir pada setiap SKPD, mengeluarkan edaran untuk mengingatkan masing-masing SKPD untuk menginventarisir kembali serta pembentukan tim inventarisasi memang ada tapi karena keterbatasan tenaga maka tidak dapat berjalan dengan baik.
  - b) Melakukan penelusuran terhadap tanah-tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang yang belum bersertifikat. Selain itu, dari SKPD dapat bersurat ke BPKAD Bagian Pengamanan Aset untuk meminta bantuan pembuatan sertifikat.
  - c) Melakukan pelatihan tenaga ASN melalui bimtek penilaian barang.
  - d) Melakukan penertiban kendaraan yang dilakukan oleh SKPD bersangkutan. Apabila SKPD tersebut sudah kewalahan untuk melakukan penertiban, maka SKPD tersebut akan bersurat ke BPKAD Bidang Pengamanan Aset. Sehingga dari Bagian Pengamanan Aset akan turun langsung untuk menarik kembali kendaraan tersebut.
  - e) Melakukan pembekalan melalui bimtek perhitungan NJOP.
  - f) Pada tahun 2017 sudah mulai tersentralisasi untuk di catat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kesehatan.

## 6.2 Saran

1. Untuk SKPD di Kabupaten Kupang agar segera mengambil langkah-langkah konkret menginventarisir aset tetap guna melengkapi data aset tetap secara terperinci, sehingga pencatatan KIB, KIR dan Labelisasi/Pengkodean aset tetap terlaksana dengan baik.
2. BPKAD sebaiknya berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang untuk memproses pembuatan sertifikat atas aset tetap tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang yang belum bersertifikat.
3. BPKAD Kabupaten Kupang khususnya Bidang Aset untuk segera menetapkan NJOP dengan nilai wajar terhadap aset tetap berupa tanah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.
4. BPKAD Kabupaten Kupang khususnya Bidang Aset melakukan proses pemutihan terhadap aset yang dibawa pensiunan dan dibawa mutasi.
5. BPKAD Kabupaten Kupang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kesehatan untuk menginventarisasi aset tetap yang dihasilkan dari pengeluaran dana BOS dan JKN Kapitasi.
6. BPKAD Kabupaten Kupang khususnya Bidang Aset harus bekerjasama dengan semua SKPD untuk melakukan inventarisasi terhadap aset tetap yang belum tercatat sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.
7. BPKAD Kabupaten Kupang agar menyelenggarakan pelatihan secara berkala bagi bendahara barang di setiap SKPD. Diupayakan agar menempatkan bendahara barang yang berdisiplin ilmu Ekonomi Akuntansi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A, James L. Loebbecke. (2003). *Auditing: An Integrated Approach*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). (1988). *Conditification of Auditing Standarts and Procedures*. New York: AICPA
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Bastian, Indra. (2014). *Audit Sektor Publik: Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Baun, T. Farah. (2011). *Kajian Hasil Audit BPK RI Terhadap Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kota Kupang TA 2009*. Skripsi Jurusan Akutansi, Fakultas Ekonomi. Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang.
- Erlina; dkk. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah: Berbasis Akrual*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul & Syam Kusufi, Muhammad. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Hery. (2013). *240 Konsep Penting Akuntansi dan Auditing*. Penerbit Gava Media: Yogyakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2012). *Standar Akuntansi Keuangan*. PSAK. Cetakan Keempat, Buku Satu. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Lailatul Khasanah, Nur & Nur Rahardjo, Shiddiq. (2014). *Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Akutansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Machfoedz, Mas'ud dan Mahmudi. (2008). *Materi Pokok Akuntansi Manajemen*. Universitas Terbuka, Jakarta.
- Mahmudi. (2006). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

- Marfiana, Nandhya & Kurniasih, Lulus. (2013). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa*. Jurnal Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret, Solo.
- Murwanto, Rahmadi; dkk. (2011). *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Penerbit LPKPAP, BPKP, Departemen Keuangan RI.
- Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sutri Kolinung, Monika, Ilat, Ventje, dan Pinatik Sherly. (2015). *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon*. Jurnal EMBA. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2011 *Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas– Dinas Daerah Kabupaten Kupang*.
- \_\_\_\_\_, Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang *Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan*.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Bupati Kupang Nomor 48 Tahun 2016 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Kupang*.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- \_\_\_\_\_, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 Tahun 2010 tentang *Penyajian Laporan Keuangan*.
- \_\_\_\_\_, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tahun 2010 tentang *Akuntansi Aset Tetap*.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.

- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang *Badan Pemeriksa Keuangan*.